

Memberi Dukungan Pelayanan Sosial kepada Korban Perdagangan Orang yang Bertindak sebagai Saksi dalam Proses Hukum

WARNATH GROUP
PANDUAN PRAKTIK



The WARNATH GROUP

Memberi Dukungan Pelayanan Sosial kepada Korban Perdagangan Orang yang Bertindak sebagai Saksi dalam Proses Hukum

PANDUAN PRAKTIK
Oleh *The Warnath Group*

SEKILAS PANDUAN

Ditujukan untuk:

- Pekerja sosial, manajer kasus, staf *shelter*, dan para pendamping korban perdagangan orang.

Pesan utama: Para petugas pelayanan sosial dapat berkontribusi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang dengan mendukung saksi korban untuk bekerja sama dengan penegak hukum.

Dalam Panduan Praktik ini:

- Peran petugas pelayanan sosial dalam proses peradilan pidana
- Beberapa skenario berdasarkan kasus-kasus nyata
- Bagaimana memberikan dukungan dengan memastikan korban mendapat informasi yang diperlukan tentang proses peradilan pidana
- Pertimbangan-pertimbangan untuk menyusun rencana keselamatan dan dukungan selama proses peradilan pidana

Pendekatan yang Berpusat pada Korban untuk Kasus Perdagangan Orang

Pendekatan yang berpusat pada korban dalam proses peradilan pidana berupaya meminimalkan trauma berulang terhadap korban dengan memprioritaskan kebutuhan korban dan menawarkan: 1) advokasi dan dukungan; 2) layanan yang holistik, tepat secara budaya dan *trauma-informed*;¹ 3) pilihan, kontrol dan kesempatan untuk berperan aktif dalam membawa para pelaku perdagangan orang ke pengadilan. Pendekatan praktik terbaik ini mendorong kolaborasi aktif semua pihak dan akan memberdayakan korban untuk menjadi saksi yang efektif. Idealnya, pendekatan yang

¹Ketika memberikan layanan, penting mempertimbangkan bahwa korban mungkin mengalami trauma, dan efek trauma tersebut harus direspons secara tepat di semua tingkatan. Seluruh pihak yang terlibat perlu memahami tentang dampak luas dari trauma, jalur-jalur untuk pemulihan, serta tanda dan gejala trauma (pada korban, keluarga, dan petugas), dan secara aktif harus menghindari terjadinya trauma berulang (*re-traumatization*). Pengetahuan tentang trauma perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan, prosedur dan praktik.

berpusat pada korban untuk kasus-kasus perdagangan orang diadopsi dan diimplementasikan oleh semua aktor dalam sistem peradilan pidana termasuk polisi, jaksa, penyedia layanan hukum dan sosial, petugas pengadilan dan pejabat peradilan.

Pekerja sosial, manajer kasus, staf *shelter* dan layanan sosial lainnya memainkan peran penting dalam membantu korban perdagangan orang untuk membangun kembali kehidupan mereka yang bebas dan mandiri. Mereka juga membantu penegak hukum untuk membawa pelaku perdagangan orang ke pengadilan dengan mendukung saksi korban yang memilih untuk memberi informasi dan kesaksian melawan para pelaku yang memperdagangkan mereka.

Petugas pelayanan sosial biasanya menjadi penghubung antara penegak hukum dan korban untuk mengkoordinasikan keterlibatan korban seiring dengan berbagai dukungan dan pemulihan lainnya. Selain memiliki posisi sentral untuk mengadvokasi hak-hak dan kepentingan korban selama proses peradilan pidana, petugas pelayanan sosial juga berkewajiban mendukung lembaga dan pilihan-pilihan mereka - termasuk pilihan untuk bekerja sama dengan polisi dan jaksa. Jika memungkinkan, korban sebaiknya didampingi seorang petugas pelayanan sosial yang ditugaskan untuk menjadi narahubung dengan penegak hukum sejak identifikasi dilakukan, hingga proses hukum selesai. Hal ini akan memastikan konsistensi, ketepatan, dan kestabilan bagi para korban di seluruh proses peradilan pidana.

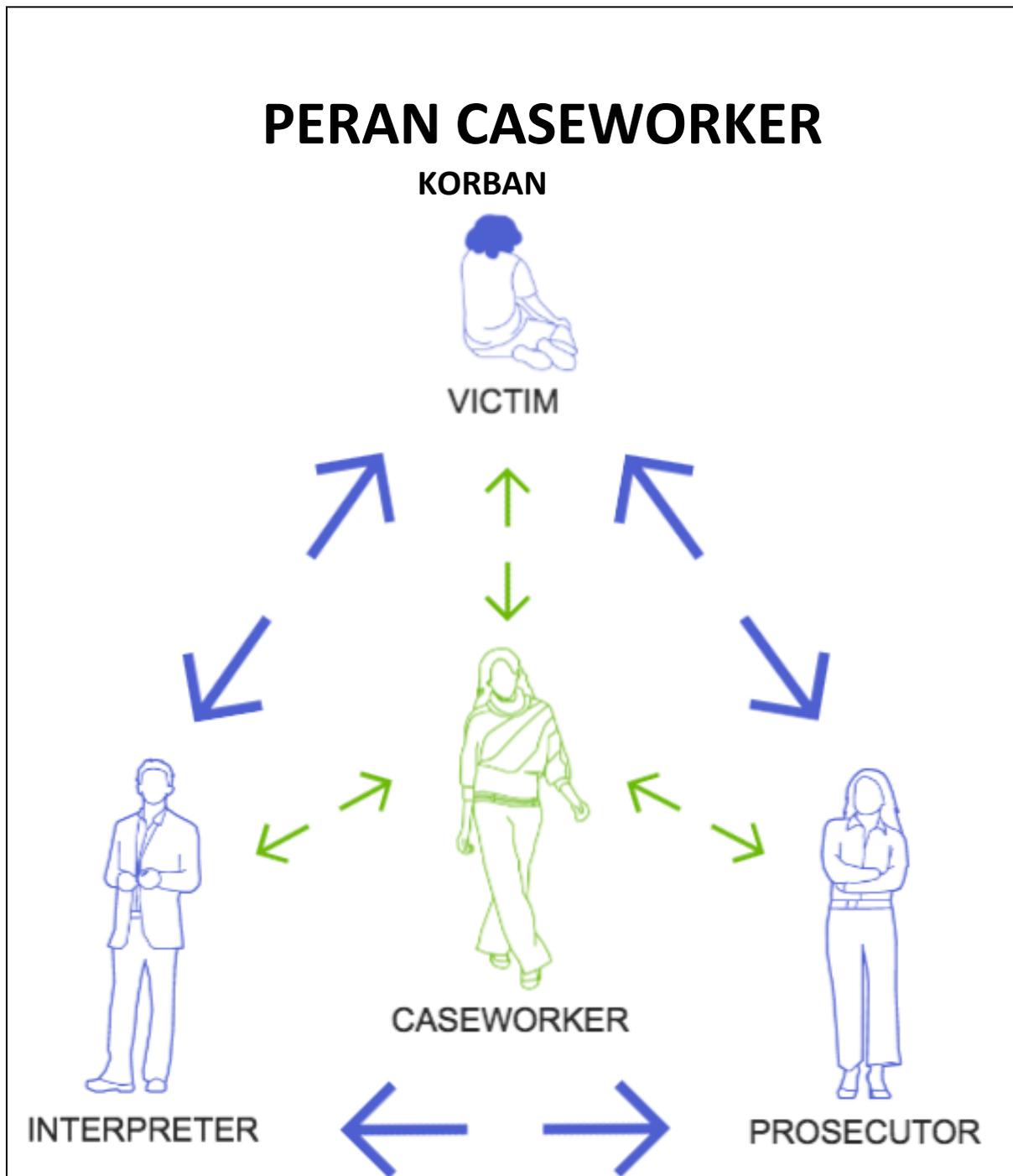


Membangun Tim

Pertemuan rutin antara penyedia layanan sosial dan penegakan hukum, di luar dari kerja sehari-hari mereka saat membantu para korban, akan meningkatkan rasa saling percaya dan saling memahami, relasi positif dan kesempatan untuk meningkatkan langkah-langkah praktis dalam bekerja bersama. Silahkan gunakan Panduan Praktik *the Warnath Group* yang tersedia di www.warnathgroup.com/publications untuk menetapkan tujuan bersama, memahami peran /tanggung jawab satu sama lain dan memfasilitasi diskusi tentang kolaborasi.

Petugas pelayanan sosial dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban dengan mempelajari Panduan Praktik dari *the Warnath Group* berikut ini, yang tersedia di www.warnathgroup.com/publications:

1. *“Interviewing Victims of Human Trafficking: Promising Practices for Law Enforcement and Prosecutors” Online Tutorials Parts 1 – 3 (“Mewawancarai Korban Perdagangan Orang: Praktik-Praktik yang Menjanjikan bagi Penegakan Hukum dan Jaksa” Tutorial Online Bagian 1 – 3)*
2. *“Prosecutor Trial Preparation – Preparing the Victim of Human Trafficking to Testify”/ “Persiapan Sidang Tuntutan- Mempersiapkan Korban Perdagangan Orang untuk Bersaksi”*



PENERJEMAH

JAKSA

“Karena Caseworker terlibat sejak awal, dia memiliki pandangan paling global tentang situasi korban setelah mengalami perdagangan orang. Lembaga-lembaga seperti lembaga saya terlibat di berbagai titik dan kemudian tidak terlibat lagi ketika peran kami selesai. Caseworker menjadi pusat dari roda yang menghubungkan semua orang, terus memastikan agar korban mendapat informasi lengkap dan menjadi pusat dari upaya kita. Caseworker selalu memastikan kami untuk menyediakan penerjemah; kami begitu fokus dengan pekerjaan kami sendiri sehingga kadang-kadang kami lupa mengurusnya!” - Jaksa

Persetujuan untuk Bekerjasama (*informed consent*) sebagai Saksi Korban

Para korban harus terlebih dahulu memberikan persetujuan resmi untuk bekerja sama (*informed consent*) dengan penegak hukum melawan orang-orang yang memperdagangkan mereka. Banyak faktor berkontribusi terhadap keputusan ini – beberapa di antaranya adalah pertimbangan keluarga, kesempatan kerja atau pendidikan yang ada di tempat lain, kesehatan mental dan fisik, dan perasaan takut. Petugas pelayanan sosial tidak boleh mempengaruhi atau memberi saran kepada korban tentang keputusan apa yang harus diambil. Peran mereka adalah memastikan para korban menerima informasi sebaik mungkin tentang apa saja dampak yang bisa terjadi dari keterlibatan mereka dan/atau ketidakterlibatan mereka. Sangat penting bagi para korban untuk memahami pilihan mereka dan terus didukung selama menjalani proses peradilan. Dalam kasus yang melibatkan banyak korban, setiap korban harus diakui dan diperlakukan sebagai individu-individu yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Para korban harus memiliki akses untuk mendapatkan nasihat hukum independen yang berkelanjutan dalam bahasa mereka dan informasi tertulis tentang:



Tujuan proses peradilan pidana



Peran, hak, dan kewajiban mereka sebagai saksi korban termasuk hak untuk mengundurkan diri dari kerja sama



Gambaran umum prosedur pengajuan perkara melalui sistem peradilan



Kemungkinan hasil yang dapat dicapai jika mereka berpartisipasi dan tidak berpartisipasi (positif, negatif, jangka pendek, jangka panjang)



Perkiraan jadwal mereka memberikan keterangan dan proses-proses persidangan yang harus diselesaikan



Bagaimana partisipasi korban akan didukung dan oleh siapa (termasuk jika akan menunjuk pengacara untuk mewakili kepentingan mereka)



Bagaimana proses peradilan pidana mungkin akan bersinggungan dengan isu-isu hukum lainnya seperti migrasi, ganti rugi, utang, dll.

Di beberapa negara, informasi di atas dapat diberikan oleh polisi, jaksa, staf hukum (*legal officer*) atau petugas penegak hukum lainnya. Kehadiran petugas pelayanan sosial selama pemberian informasi ini dapat membantu korban merasa lebih nyaman untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran dan menindaklanjutinya setelah itu jika ada sesuatu yang tidak dipahami atau memerlukan klarifikasi.

Penting untuk diperhatikan bahwa persetujuan tidak boleh diminta saat korban masih mengalami krisis fisik atau emosional. Penyedia layanan sosial, medis, dan kesehatan mental harus melakukan advokasi dengan penegak hukum mengenai kesiapan korban untuk mempertimbangkan kerja sama ini. Setiap kekhawatiran tentang apakah persetujuan sudah bisa diberikan atau belum harus ditangani sepenuhnya. Seorang korban TIDAK BOLEH ditekan, dipaksa atau dimanipulasi untuk bekerja sama sebagai saksi oleh para profesional yang terlibat dengan mereka, baik dari LSM atau lembaga-lembaga pemerintah.

Banyak korban mengalami gangguan stres akut setelah keluar dari situasi perdagangan orang dan mungkin berisiko terhadap diri mereka sendiri atau orang lain. Jika memungkinkan, penyedia layanan sosial harus menawarkan layanan kesehatan mental yang profesional untuk melakukan penilaian risiko dan membantu korban mengembangkan strategi untuk mengelola berbagai gejala yang ada pada mereka. Seorang profesional bidang kesehatan mental juga dapat mengidentifikasi setiap kondisi yang dapat menghalangi kesiapan korban untuk membuat pernyataan

yang efektif termasuk berbagai gangguan atau masalah kognitif yang mungkin memerlukan perawatan jangka panjang. Akses ke pengobatan juga dapat diupayakan untuk membantu menstabilkan kesehatan mental mereka dalam jangka pendek. Jika layanan dapat diberikan dalam jangka panjang, rencana perawatan kesehatan mental dapat disesuaikan dengan bagaimana cara terbaik mengelola stres dan kecemasan ketika memberikan keterangan kepada penegak hukum dan menyampaikan bukti di pengadilan. Selain itu, layanan kesehatan mental dapat membantu korban untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru mengenai advokasi mandiri, mengelola relasi dengan orang lain dan meningkatkan resiliensi.

Banyak korban memilih untuk tidak terlibat dengan layanan kesehatan mental karena stigma dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental. Minimnya ketersediaan dan akses ke layanan kesehatan mental juga terjadi di banyak negara. Dengan tidak adanya dukungan layanan kesehatan mental yang profesional, setiap upaya harus dilakukan oleh petugas pelayanan sosial untuk memberikan pendidikan psikoedukasi secara reguler, konseling informal dan berbagai kegiatan terapi. Di lingkungan *shelter*, ini akan menumbuhkan dukungan di antara teman sebaya, suasana yang lebih harmonis dan meningkatkan manajemen krisis kesehatan mental oleh petugas. Kesehatan mental yang lebih baik akan meningkatkan kemungkinan korban membangun kepercayaan dengan perwakilan penegak hukum dan meningkatkan kualitas informasi yang diberikan.

Pekerja Sosial Sara dan Penyidik Martin



KORBAN



PEKERJA SOSIAL SARA



PENYIDIK MARTIN

Penyidik Martin ditugaskan untuk mendapatkan pernyataan dari seorang perempuan yang diperdagangkan ke dalam perbudakan rumah tangga di mana dia mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Perempuan tersebut sangat ingin membuat pernyataan polisi, sehingga Penyidik Martin mengatur wawancara melalui pekerja sosial (bernama Sara) yang mendampingi perempuan itu. Pada hari pelaksanaan wawancara, Sara menelepon Penyidik Martin bahwa perempuan itu sedang dirawat di rumah sakit dan perlu menjadwalkan ulang kegiatan wawancara. Ketika wawancara yang dijadwalkan ulang akan dilakukan, perempuan itu mengalami pusing-pusing, sesak nafas, dan mengatakan bahwa ia merasa seperti mengalami serangan jantung. Sara memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit lagi. Sara membahas kejadian ini dengan Penyidik Martin dan rencananya untuk menghubungi seorang psikolog untuk membantu korban. Penyidik Martin memutuskan untuk menunda pertemuan dengan korban sampai rencana dukungan dapat diimplementasikan dan meminta seorang penyidik perempuan untuk melakukan wawancara, sementara ia duduk di belakangnya sambil membuat catatan. Dalam waktu satu bulan, Sara dan psikolog mampu membantu korban mengelola gejala penyakit dalam dirinya dan secara efektif memberikan pernyataan kepada polisi. "Berkat kerjasama dengan pendamping korban, saya bisa mendapatkan pernyataan yang sangat baik dan lengkap melalui tiga wawancara pendek. Jika saya tidak menunggu dan membawa rekan kerja saya, saya pikir korban tidak akan bisa mengingat informasi penting yang bisa saya tindak lanjuti. Adanya Sara dalam wawancara juga berarti bahwa dia dapat membantu korban mengelola stresnya ketika bercerita tentang kenangan menyakitkan terkait dengan kejahatan yang dideritanya dan saya dapat berkonsentrasi pada pekerjaan saya." - Penyidik Martin

Berkoordinasi dengan Penegak Hukum

Setelah persetujuan resmi (*informed consent*) didapatkan, petugas pelayanan sosial harus secara proaktif berkomunikasi dengan penegak hukum atas nama korban untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya. Berkas-berkas yang terkait dengan korban harus diperoleh, dan dokumentasi resmi berisi informasi yang menyangkut korban dan kasusnya harus dipastikan aman. Korban harus diinformasikan tentang dokumentasi yang disimpan oleh penyedia layanan sosial dan diperbolehkan melihat file kasusnya sendiri jika mereka memintanya. Korban juga harus diinformasikan tentang nama-nama dan nomor kontak dari semua orang yang terlibat dengan kasus pidananya serta kontak lain yang terkait dengan dukungan mereka disertai penjelasan tentang peran masing-masing.

Setelah korban keluar dari situasi perdagangan orang, bukti yang menguatkan pernyataan mereka (juga saksi-saksi lain) mungkin saja hilang, berubah atau rusak. Kemungkinan besar, polisi, jaksa dan pengawas ketenagakerjaan akan mewawancarai korban sesegera mungkin. Di beberapa negara, tugas-tugas investigasi tidak fleksibel karena mempunyai batasan waktu yang ketat dan akuntabilitas yang melekat pada proses investigasi. Penegak hukum akan berada di bawah tekanan dari lembaga mereka untuk menyegerakan investigasi dan dari layanan sosial / pendamping korban untuk segera menyampaikan informasi. Hal ini bisa menciptakan ketegangan di antara semua pihak yang terlibat. Namun, jika korban memutuskan untuk bekerja sama, mereka harus diberi kesempatan untuk memberi informasi sebaik mungkin kepada penyidik. Penyedia layanan sosial sebaiknya tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu atau tidak masuk akal bagi penegak hukum untuk dapat mengakses korban dalam upayanya mendapatkan informasi dan bukti secara tepat waktu.

Petugas pelayanan sosial harus berupaya memberdayakan korban untuk membuat keputusannya sendiri tentang kapan dan bagaimana bekerja sama dengan pihak berwenang dengan memastikan bahwa rencana dukungan untuk mereka sudah tersedia. Memberikan informasi atau pernyataan mungkin akan membuat korban merasa tertekan dan bahkan memicu gejala stres yang traumatis (sulit berkonsentrasi, marah, sedih, berpikir untuk bunuh diri, gelisah/takut, dll.). Bantulah korban untuk merencanakan strategi koping apa yang akan mereka gunakan selama bekerja sama dengan penegak hukum dan kemudian rencanakan untuk melakukan diskusi bersama setelah itu. Bantulah korban mengidentifikasi kegiatan yang mereka sukai atau yang membuat mereka merasa tenang. Ini mungkin sesederhana berjalan-jalan, mendengarkan musik atau minum teh.

Penyidik Carl dan Caseworker Ann



PENYIDIK CARL CASEWORKER ANN KORBAN

Seorang pekerja seks migran diperdagangkan ke sebuah lokasi prostitusi dan mengalami berbagai serangan serius. Korban tidak mau berbicara sama sekali dengan polisi setelah melarikan diri dan menderita penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Caseworker yang mendampingi, Ann, mengatakan kepada penyidik (Carl) bahwa korban juga merasa sangat malu karena orang-orang mengetahui pekerjaannya. Atas persetujuan dan konsultasi dengan korban, Ann mengajak dokter, pengacara, penasihat kesehatan mental, penyidik Carl, dan jaksa untuk bersama-sama membuat manajemen risiko dan rencana dukungan yang menetapkan *time line*, batas-batas yang ada, dan panduan yang dapat diterima terkait keterlibatan mereka dengan korban.

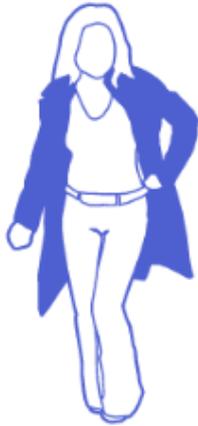
Penyidik Carl menyatakan, "Sangat membantu saya untuk memahami semua tantangan yang dihadapi korban saat ini dan di mana saya menyesuaikan diri sebagai penyidik. Ini juga membuat saya memahami tentang apa yang dilakukan orang lain untuk mendukung korban dan bagaimana kondisi kesehatannya akan mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan pernyataan. Saya mencoba untuk sangat berhati-hati agar dia tidak merasa dihakimi oleh saya karena bekerja dalam industri seks. Korban bisa melihat kita semua bekerja sama untuk membantunya melakukan yang terbaik, dan Saya pikir ini membuatnya lebih percaya diri. Dia adalah saksi yang luar biasa."

Hak Berkomunikasi dengan Keluarga dan Pihak lain

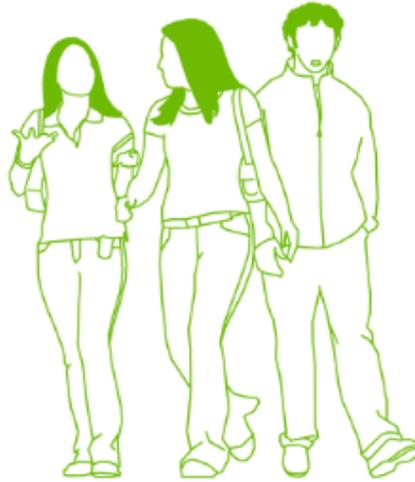
Para pelaku perdagangan orang sering mengendalikan korbannya agar tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka sehingga korban semakin terisolasi dan tidak punya peluang untuk mencari pertolongan. Beberapa korban sama sekali dilarang menghubungi keluarga mereka, atau kontaknya dibatasi dan diawasi oleh pelaku perdagangan orang. Beberapa korban dipaksa untuk berbohong kepada keluarga tentang situasi mereka. Hilang kontak dengan anak-anak, pasangan, orang tua dan keluarga besar yang sering mengandalkan korban untuk mengirimi mereka uang tentunya sangat menyedihkan bagi korban. Perdagangan orang telah memisahkan para keluarga. Setelah korban melarikan diri dari pelaku, segala upaya harus dilakukan untuk membantu mereka terkoneksi kembali dan memulihkan hubungan mereka dengan keluarga dan pihak lain dalam kehidupan mereka jika mereka menginginkannya. Komunikasi dengan keluarga dan teman-teman (dengan berbagai risikonya) dapat dituangkan ke dalam perencanaan tentang keselamatan dini dan, sebagai bagian dari haknya, korban diberi informasi untuk membantu mereka menilai apa yang dibagikan, kepada siapa dibagikan dan bagaimana membaginya disertai berbagai kemungkinan yang terjadi- positif / negatif dan jangka pendek / jangka panjang. Petugas pelayanan sosial dapat mendiskusikan hal ini dengan korban bersama penegak hukum untuk membantu mengembangkan jalur komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan. Korban sebaiknya diinformasikan bahwa jika mereka tidak yakin tentang seseorang yang akan mereka ajak berkomunikasi, mereka bisa meminta bantuan untuk menilai dampaknya.

Selalu ada risiko dimana korban akan menghubungi pelaku yang memperdagangkannya atau jaringannya, atau mungkin korban akan berbohong atau memberi informasi yang salah kepada penyidik dan dapat berdampak buruk pada penyidikan. Keluarga dan teman-teman korban mungkin akan berusaha mempengaruhi keputusan korban tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan dan bahkan menekan korban untuk bertindak di luar apa yang menjadi kepentingan terbaik korban. Proses mengembalikan kebebasan, pilihan, dan kontrol bagi korban harus didukung sehingga mereka dapat terkoneksi kembali dengan orang-orang dan relasi-relasi yang membuat mereka merasa aman sebagai prioritas. Pendekatan yang berpusat pada korban mengakui bahwa orang-orang membuat pilihan berdasarkan berbagai faktor, termasuk apa yang terbaik bagi diri mereka, keluarga / teman dan komunitas mereka - bukan yang terbaik untuk LSM, polisi, jaksa atau kasus pidananya.

Anggota Polisi Jennifer dan Staf LSM



ANGGOTA POLISI JENNIFER



STAF LSM



KORBAN KEN

“Ken (laki-laki) diperdagangkan ke sebuah pabrik dan sudah hampir dua tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Mereka mengira Ken sudah meninggal. Ken dan sebagian besar pekerja lain merasa takut untuk bekerja sama dengan kami untuk mengadili dan menuntut bos pabrik itu. Kami membawa mereka ke *shelter* milik LSM, dan banyak dari mereka langsung menghubungi keluarga mereka meskipun kami telah meminta staf LSM untuk tidak memperbolehkan mereka mengontak siapa pun. Sebagian besar keluarga korban menyuruh korban untuk tidak berbicara dengan kami. Beberapa anggota keluarga juga diancam oleh perekrut - kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pada awalnya ini membingungkan karena semua orang saling berbicara satu sama lain, namun tidak ada satu pun yang mau berbicara dengan kami. Staf LSM bekerja keras untuk memastikan masing-masing korban menyampaikan hasil pertimbangan mereka sendiri. Mereka (Staf LSM) bahkan berbicara dengan beberapa keluarga korban dan membantu menjelaskan proses yang dilalui di sini. Pada akhirnya, Ken memutuskan untuk bekerja sama dengan kami. Keluarganya sangat marah setelah mengetahui apa yang terjadi pada Ken. Partisipasi Ken ternyata menumbuhkan keberanian kepada dua pekerja lain yang kemudian memutuskan untuk bekerja sama. Seandainya Ken tidak mendapat dukungan dari keluarganya, dia tidak akan pernah berbicara kepada kami, dan tidak akan ada kasus sama sekali.”

- Anggota Polisi Jennifer

Menangani Pengungkapan Informasi

Petugas pelayanan sosial mungkin baru mendapat informasi yang relevan terkait dengan kasus ketika proses pendampingan korban sudah berjalan. Terkadang, ini semata-mata karena korban belum pernah ditanya tentang isu-isu tertentu, tidak memahami hubungannya dengan konteks kasus atau terlupakan/ terhambat karena saat itu korban sedang mengalami trauma. Kadang-kadang korban dengan sengaja menyembunyikan informasi karena berbagai alasan termasuk malu, takut ikut dikriminalkan, atau karena mereka mendapat ancaman. Petugas pelayanan sosial harus mendiskusikan informasi-informasi tersebut dengan korban dan menawarkan dukungan kepada mereka untuk membagikannya kepada penegak hukum. Pada akhirnya, keputusan tentang informasi apa yang akan dibagikan kepada penegak hukum, ada di tangan para korban. Jika korban memiliki kuasa hukum, mereka juga bisa meminta saran dari pengacara mereka. Beberapa pengungkapan informasi mensyaratkan petugas pelayanan sosial untuk membuat laporan wajib (*mandatory reports*) kepada pihak berwenang dan bervariasi setiap yurisdiksinya. Petugas pelayanan sosial harus memeriksa kewajiban untuk membuat laporan tersebut dan memastikan bahwa mereka memahami kebijakan dan prosedur pelaporan.

Orientasi Persidangan dan Dukungan Persidangan

Setiap upaya untuk melakukan kunjungan ke pengadilan bersama korban harus dilakukan sehingga mereka dapat mulai memvisualisasikan partisipasi mereka secara rinci. Penyedia layanan sosial harus betul-betul mengupayakan agar hal ini dapat diwujudkan, termasuk dengan melakukan advokasi ke jaksa dan penyidik, jika memungkinkan. Orientasi tentang persidangan sebaiknya minimal terdiri dari:



Kunjungan ke ruang aman di mana korban dan para pendukungnya akan menunggu sebelum dipanggil ke ruang sidang (jika ada)



Akses ke makanan / minuman / toilet dan penjelasan tentang kemungkinan terjadinya keterlambatan sebelum mereka dipanggil sebagai saksi



Penjelasan tentang di mana orang-orang akan duduk di ruang sidang termasuk terdakwa pelaku perdagangan orang, penjelasan tentang bagaimana hakim akan menjalankan persidangan dan apa saja peran setiap orang di ruang sidang



Bagaimana saksi korban dapat menyampaikan bukti melalui tautan video atau dari balik layar (jika ada)



Permainan peran tentang bagaimana korban memasuki pengadilan, duduk di kursi saksi, saat diperiksa (termasuk bagaimana bekerja dengan penerjemah) dan meninggalkan ruang sidang menuju ruang aman



Penjelasan tentang bahasa dan tata tertib persidangan termasuk pengucapan janji atau sumpah, etika persidangan, dan teknis penyampaian bukti atau keterangan



Permainan peran tentang di mana petugas pelayanan sosial dan para pendukung lainnya akan duduk selama persidangan sehingga korban dapat secara jelas melihat mereka ketika sedang menyampaikan bukti atau keterangan dan menjalani pemeriksaan silang (*cross-examination*)



Kapan informasi tentang bagian dari proses persidangan yang boleh/tidak boleh dihadiri korban dan yang boleh/tidak diboleh dihadiri terdakwa akan disampaikan



Kapan informasi tentang saksi lain yang dipanggil dalam kasus ini (jika diizinkan) dapat disampaikan



Informasi tentang apakah media dapat menghadiri dan melaporkan proses persidangan, termasuk apakah nama korban, informasi biografi dan / atau foto dapat digunakan



Sebuah rencana bersama polisi, jaksa dan korban untuk menciptakan transportasi yang aman menuju dan dari persidangan termasuk keamanan korban dari terdakwa dan media saat masuk dan keluar persidangan, dan rencana untuk menangani media jika tak bisa dihindari (segala upaya harus dilakukan agar korban tidak terekspos ke media)



Informasi tentang akses untuk meninjau laporan polisi (LP) mereka atau bukti fisik lainnya yang akan disampaikan di persidangan



Jika terdapat hukuman (pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan), informasi tentang peluang untuk menyampaikan *Victim Impact Statements (VIS)*², mengajukan restitusi atau strategi kompensasi lainnya.

² *Victim Impact Statement (VIS)* adalah sebuah pernyataan tertulis, atau bisa dibacakan secara lisan, yang disampaikan kepada hakim, yang berisi rincian tentang dampak suatu tindakan pidana terhadap korban. Dalam pernyataannya, korban perdagangan orang dapat menyampaikan tentang apa yang terjadi pada mereka dan

Jika memungkinkan dan diizinkan, akan sangat berguna bagi korban untuk mengamati sebuah proses persidangan lain, yang tidak terkait dengan perkara mereka, sehingga mereka bisa menyaksikan bagaimana orientasi yang mereka dapatkan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Sebagai tindak lanjut dari orientasi persidangan, petugas pelayanan sosial perlu bekerja bersama polisi, untuk memastikan rencana keamanan, yang telah dibangun dan dikomunikasikan kepada korban, ketika korban menyampaikan bukti di persidangan, mencakup:

-  Keamanan fisik - menuju pengadilan dan dari pengadilan, keamanan di gedung pengadilan, akses ke makanan / minuman / toilet
-  Keamanan emosional - strategi untuk mengurangi stres dan cara meminta bantuan jika korban merasa kewalahan
-  Keselamatan anggota keluarga
-  Keselamatan manajer kasus/pendamping korban / penyedia layanan /para pendukung
-  Dukungan masyarakat untuk saksi korban di persidangan - tempat duduk para pendukung
-  Para pendukung pelaku perdagangan orang - cara menghindari orang-orang ini termasuk tidak melakukan kontak mata
-  Pengelolaan media

bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka. Pernyataan ini membantu hakim memahami apa yang dilakukan pelaku perdagangan orang terhadap korban, dan bagaimana penderitaan korban, sehingga dapat memutuskan hukuman yang tepat dan adil bagi korban.

Tugas Tindak Lanjut Penyedia Layanan Sosial Pasca Persidangan

Petugas pelayanan sosial dapat berperan dalam membantu menyelesaikan proses peradilan pidana dengan memastikan:



Penjelasan kepada korban mengenai hasil persidangan dan mengapa penuntutan berhasil atau tidak berhasil dan langkah selanjutnya (misalnya, banding).



Pengembalian properti pribadi termasuk dokumen identitas.



Pemberian biaya pengganti (misalnya, pergantian biaya transportasi, akomodasi) dan pembayaran uang (misalnya, restitusi dan kompensasi) kepada korban, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Korban memahami bagaimana menyimpan seluruh dokumen hukum yang terkait dengan kasus, dan sejauhmana orang lain bisa/tidak bisa mengaksesnya, termasuk media, peneliti, dan lembaga pemerintah.



Hak-hak korban dan akses ke informasi tentang pelaku setelah proses hukum dilakukan. Jika pelaku dipenjara, apa saja hak-hak korban yang perlu diketahui tentang kapan para pelaku akan dibebaskan dan bagaimana hal itu akan terjadi?



Penilaian atau perencanaan keselamatan lebih lanjut yang mungkin diperlukan, terutama jika penuntutan tidak berhasil.

Sementara tidak ada yang bisa menjamin bahwa penuntutan akan berhasil, korban yang merasa didukung, didengar dan dipercaya oleh tim yang menangani kasusnya telah diberdayakan melalui proses peradilan pidana. Hal ini, dengan sendirinya, merupakan sebuah capaian keberhasilan.

Ucapan Terima Kasih

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemberian dukungan kepada korban perdagangan orang selama proses peradilan pidana, silahkan hubungi *the Warnath Group* di info@WarnathGroup.com. *The Warnath Group* mengucapkan terima kasih kepada Jennifer Stanger, Spesialis Anti-Perbudakan pada *End Slavery Solutions*, atas kontribusinya dalam mempersiapkan panduan ini. Untuk mengakses berbagai perangkat praktis dan sumber daya tambahan, silahkan kunjungi situs web kami di www.WarnathGroup.com. Berbagai studi dan bahan latar belakang tersedia di www.NEXUSInstitute.net.

Copyright © The Warnath Group, LLC 2018 All Rights Reserved. No part of this paper may be reproduced without written permission.